

Peran notaris terhadap rangka pendirian perseroan terbatas yang menggunakan surat kuasa pendiri yang cacat hukum : analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 58.PK/PID.SUS/2011 = Notary role against the deed of establishment of the limited liability company which executed by power of attorney of the founder that have a legal defect : analysis of Supreme Court Judgement Number 58.PK/PID.SUS/2011 / Meilani Nur Wulandari

Meilani Nur Wulandari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20364914&lokasi=lokal>

Abstrak

ABSTRAK

Peran notaris dalam rangka pembuatan akta pendirian perseroan terbatas yang menggunakan surat kuasa diatur dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penggunaan surat kuasa pendiri dalam rangka pendirian perseroan terbatas adalah hal yang biasa dalam praktek, akan tetapi di dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 58.PK/PID.SUS/2011, Surat Kuasa Nomor 031/765.A/VI/06/Ekon tanggal 12 Juni 2001 yang digunakan dalam rangka menandatangani akta pendirian PT. Selayar Marine Industri Nomor 3 Tanggal 12 Juni 2001, dibuat dihadapan Ridwan Zainuddin, SH, Notaris di Selayar cacat hukum karena Pendirian PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) tidak memenuhi prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Pihak Ketiga (Perda Nomor 7/1997). Surat Kuasa tersebut digunakan terdakwa II bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Selayar guna menandatangani akta pendirian PT. SMI. Pemerintah Kabupaten Selayar bertindak selaku pemilik dan pemegang saham sebesar 70% (tujuh puluh persen) saham. Berdasarkan Pasal 5 Perda Nomor 7/1997 seharusnya sebelum mendirikan perseroan terbatas harus terlebih dahulu dibuatkan perjanjian dasar mendirikan perseroan terbatas antara Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak ketiga atau swasta dan dibuatkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Selayar dengan pihak swasta, akan tetapi terdakwa II langsung menghadap kepada Notaris dan sama sekali tidak mematuhi Perda Nomor 7/1997. Pendirian PT. SMI merugikan Pemerintah Kabupaten Selayar karena PT. SMI seharusnya tidak pernah didirikan bahkan tindakan penyetoran APBD tahun anggaran 2001 sebagai setoran modal Pemerintah Kabupaten Selayar adalah tindak pidana korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum bersifat yuridisnormatif, bersifat deskriptif, dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Hasil penelitian menyarankan agar Notaris sebagai jabatan yang berwenang membuat akta pendirian perseroan terbatas wajib bertindak profesional dan cermat agar tidak terdapat kesalahan pada aktanya dan tidak menyebabkan kerugian pada

pihak-pihak yang berkepentingan.

<hr>

ABSTRACT

The role of the notary in order to making the Deed of Establishment of the Limited Liability Company by the Power of Attorney is stipulated by Article 8 paragraph (3) of the Law Number 40 Year 2007 concerning Limited Liability Companies. The use of the Power of attorney of the founder, practically, is ordinary process, but in the Supreme Court Judgement Number 58.PK/PID.SUS/2011, the Power of Attorney Number 031/765.A/VI/06/Ekon dated on June 12nd 2001 which used in order to signing the Deed of Establishment of PT. Selayar Marine Industri Number 3 dated on June 12nd 2001, executed before Ridwan Zainuddin, SH, Notary in Selayar is legal defect because the Establishment of PT. Selayar Marine Industri (PT. SMI) isn't in accordance with the prevailing procedurs and contrary to the Regional Regulation Number 7 Year 1997 concerning the Regional Capital Participation in Third Party (Reg Number 7/1997). That power of attorney is used by defendant II acting for and on behalf of the Government of Selayar Regencyto signing the Deed of Establihsment of PT. SMI. The Government of Selayar Regency acting as shareholder who own 70% (seventy percent) shares. In accordance with Article 5 Reg Number 7/1997 should before establishing the limited liabilities company, The Government of Selayar must be first entered into the basic aggrement of establishing the limited liabilities company between the Government of Selayar Regency and third party and issued the Regional Regulation concerning the Government of Selayar Regency Capital Participation in Third Party, but the defendant II directly before the Notary and obey the Reg Number 7/1997. The Establishment of PT SMI is disadvantage for the Government of Selayar Regency because PT. SMI should never been established even the payment of the APBD year 2001 as paid up capital is corruption. This research is a legal research of yuridis-normative and descriptif and the data are used the secunder data. The conclusion of this research is suggesting Notary as an authorized functional for making the Deed of Establishment of the Limited Liability Companies by acted professionally and carefully so there are no mistakes in the Deed and not accusing the disadvantages to the related parties.